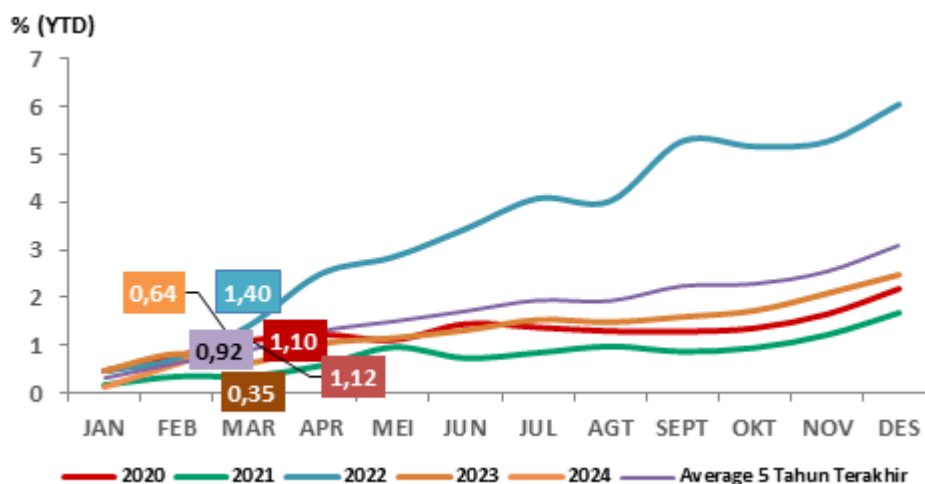


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Jawa Barat pada triwulan I 2024 masih tercatat sebesar 3,48% (yoy), lebih rendah dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,25% (yoy). Namun demikian inflasi triwulan I 2024 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan IV 2023 yang sebesar 2,48% (yoy). Hal ini dipicu oleh berbagai tantangan baik dari sisi domestik yaitu dengan adanya periode pemilihan umum dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri maupun tantangan di level internasional berupa konflik geopolitik di timur tengah yang masih kian memanas. Lebih lanjut, relatif lebih tingginya inflasi pada periode laporan ini juga terlihat dari inflasi yang diatas rata-rata inflasi di periode yang sama pada 5 tahun terakhir (Grafik 1)



Grafik 1. Inflasi Tahun Kalender Gabungan Kota IHK Jawa Barat

Inflasi pada triwulan laporan didorong oleh peningkatan harga komoditas ternak unggas dan beras. Kenaikan harga komoditas telur dan daging ayam ras terjadi sejalan dengan kenaikan biaya input pakan ternak akibat kenaikan harga jagung pakan serta tingginya permintaan menjelang HBKN Ramadan. Selain itu, inflasi juga didorong oleh kenaikan harga beras akibat adanya pergeseran musim panen sebagai dampak kemunduran masa tanam akibat adanya el nino 2023 lalu. Hal ini sejalan dengan kinerja sektor pertanian yang berkontraksi sebesar -10,98% (yoy) di triwulan I 2024 ini.

Peningkatan inflasi tertahan oleh penurunan harga komoditas hortikultura seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah dan aneka sayuran lainnya. Penurunan harga beberapa komoditas tersebut ditengarai karena adanya panen raya di awal tahun sehingga pasokan memadai. Panen raya bawang merah mulai terjadi pada bulan Februari khususnya di wilayah Jawa Barat bagian utara dengan sentra utama Kabupaten Majalengka. Sementara itu, panen raya cabai terjadi di Kabupaten Garut dengan wilayah produsen utama Bungbulang, Caringin, Banyuresmi, dan Cisarupan.

Pada triwulan I 2024, terdapat perubahan pada inflasi spasial Provinsi Jawa Barat dengan adanya penambahan 3 wilayah inflasi dari 7 kota IHK menjadi 10 kabupaten/kota IHK yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Majalengka. Ketiga daerah tersebut memiliki peranan terhadap inflasi IHK Provinsi Jawa Barat

sebesar 28,42%. Selain itu, terdapat penyesuaian perhitungan tahun dasar berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2018 menjadi 2022, bertambahnya cakupan komoditas dari 530 menjadi 555 komoditas, serta perubahan bobot nilai konsumsi makanan dan non makanan yang masing-masing 33,20% dan 66,80% pada SBH 2018 menjadi 41,29% dan 58,71% pada SBH 2022.

Inflasi tahunan terendah terjadi di Kota Bandung dengan capaian inflasi pada triwulan I 2024 sebesar 2,58% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian inflasi Jawa Barat. Terkendalnya inflasi Kota Bandung terutama dipengaruhi oleh tekanan inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Pakaian dan Alas Kaki; Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; serta Rekreasi, Olahraga, dan Budaya yang tercatat lebih rendah dibandingkan kota IHK lainnya. **Melihat perkembangan inflasi tahun kalender spasial Jawa Barat pada triwulan I 2024, terdapat rata-rata ruang sisa target inflasi tahun 2024 sebesar 1,36% untuk seluruh kabupaten/kota IHK Jawa Barat.** Kota Tasikmalaya dan Kota Sukabumi menjadi daerah dengan ruang sisa terhadap target inflasi tahun 2024 terendah masing-masing sebesar 1,03%. Sedangkan Kabupaten Subang dengan inflasi tertinggi secara tahunan, menjadi daerah yang memiliki ruang sisa target inflasi tahun 2024 terbesar yaitu sebesar 1,94%. Capaian inflasi tahun kalender merupakan salah satu hal yang perlu diwaspadai sebagai batasan bagi setiap kabupaten/kota untuk mencapai target akhir tahun sebesar $2,5 \pm 1\%$.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah, TPID Provinsi Jawa Barat memiliki program kerja strategis berdasarkan *roadmap* pengendalian inflasi di daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait kenaikan harga yang terjadi selama triwulan-I 2024 yaitu:

1. Adanya keterlambatan masa tanam padi yang memicu kenaikan harga beras.
2. Penetapan kenaikan cukai rokok per Januari 2024 oleh Menteri Keuangan.
3. Gangguan produksi cabai di beberapa wilayah menyebabkan kenaikan harga.
4. Terjadinya kenaikan harga komoditas pangan menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga laju inflasi agar selalu berada dalam *range* target yang telah ditetapkan, TPID Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut yaitu sebagai berikut:

1. *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) “Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Menghadapi HBKN Ramadhan dan Idul Fitri serta Perluasan Digitalisasi”;
2. *Capacity Building* TPID Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dalam rangka peningkatan kapasitas anggota TPID dalam program/kegiatan pengendalian inflasi daerah serta asistensi penyusunan dokumen TPID Award 2024, khususnya *One Page Summary*;
3. Rapat Koordinasi Dwimingguan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
4. Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 H;
5. Pemantauan Harga Pangan di 81 Pasar oleh Kabupaten/Kota;

Pertemuan Penyampaian Laporan Perkembangan Harga Komoditas Pangan Strategis

6.

serta Upaya Pengendalian Inflasi oleh Tim Teknis Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SILINDA JABAR);

7. Pengembangan Aplikasi SILINDA JABAR;

8. Proses Integrasi Aplikasi SILINDA JABAR dengan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan;

9. Melaksanakan Operasi Pasar Murah Bersubsidi (OPADI);

10. Penyaluran bantuan pangan oleh BULOG sebanyak 133.368 ton periode Januari sd Maret 2024;

11. Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh BULOG sebanyak 46.550 ton periode Januari sd Maret 2024;

12. Pengiriman beras SPHP melalui ritel modern sebanyak 1.365 ton periode Januari sd 20 Maret 2024;

13. Kegiatan pompanisasi yang berasal dari bantuan Kementerian Pertanian di beberapa Kabupaten;

14. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 122 kali;

15. Penguatan Cadangan Pangan;

16. Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai;

17. Pelaksanaan Pasar Murah/Bazar Murah Menjelang HBKN Idul Fitri 2024;

18. Melaksanakan Pertemuan dengan Pelaku Usaha Beras dari Kabupaten Indramayu dalam rangka penanganan kenaikan harga beras;

19. Pelaksanaan *Weekend Market* barang kebutuhan pokok di Pusat Distribusi Provinsi (PDP) Kabupaten Purwakarta menjelang Ramadhan;

20. Penguatan PDP dengan memanfaatkan bangunan Terminal Tipe B Ciledug, Kabupaten Cirebon;

21. Peningkatan produksi tanaman hortikultura dengan melakukan jejaring kemitraan *Champion* yang ada di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat;

22. Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L);

23. Pengembangan Kawasan Aneka Cabai di 4 Kabupaten dan Bawang Merah di 4 Kabupaten;

24. Pemberian Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk 55 KUBE, 550 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sebanyak Rp1,65 milyar di 8 Kabupaten/Kota;

25. Penyaluran Program Sembako diperuntukkan kepada 3.344.049 KPM;

26. Penguatan Ekonomi Sirkular di Desa;

27. Optimalisasi Lumbung Pangan Desa (Leuit).

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Jawa Barat secara umum berdampak dalam menekan laju inflasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi ke depannya seperti:

1. Penguatan sektor produksi pangan strategis, khususnya komoditas beras, dalam menghadapi adanya anomali dan gangguan cuaca serta pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga tidak terjadi gejolak harga;

2. Digitalisasi monitoring harga pangan sehingga dapat dipantau dimana dan kapan saja;

3. Monitoring program/kegiatan terkait pengendalian inflasi daerah;

4. Perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas program Operasi Pasar terhadap pengendalian inflasi;

5. Perlu mengoptimalkan keterlibatan BUMD dan BUMDes;

Pemutakhiran data stok secara konsisten dan akuntabel;

- 6.
 7. Koordinasi kelembagaan harus mengabaikan kepentingan sektoral;
 8. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebaiknya tidak berlokasi di kantor pemerintahan dan perlu dibuat indikator khusus;
 9. Perlu Koordinasi dengan Dinas Sosial terkait data kemiskinan. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat 10 juta data kemiskinan di Jawa Barat. Perlu dibreakdown untuk menentukan lokasi pelaksanaan GPM dari DTKS tersebut.
 10. Perlu dilakukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik dalam menghitung efektifitas pelaksanaan GPM.
 11. Terkait bantuan sosial perlu dioptimalkan.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Langkah kebijakan yang diambil oleh TPID Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian inflasi selama periode triwulan-I 2024 di antaranya :

1. Setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 580/Kep.854-Rek/2021 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 tanggal 30 Desember 2021 maka perlu dilakukan monitoring pelaksanaan program kerja yang tercantum pada peta jalan tersebut oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
2. Dalam rangka upaya pengendalian kenaikan harga dan ketersediaan pasokan, khususnya menjelang HBKN Idul Fitri, maka perlu dilakukan Operasi Pasar, Sidak Pasar, dan Gerakan Pangan Murah;
3. Koordinasi TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat dilaksanakan secara intensif;
4. Optimalisasi bantuan sosial;
5. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SILINDA JABAR) dalam rangka pengendalian inflasi daerah.